

**TAJUK : ESAI**  
**JUDUL : STOP MANIPULASI NILAI PADA SISWA!**  
**PENULIS : SRI WAHYUNI, Gr.,S.Pd**  
**JABATAN : GURU GARIS DEPAN (GGD) SMAN 2 LAMBANDIA**

Setiap tahun lembaga pendidikan baik negeri atau swasta selalu dihadapkan pada Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Ketika waktu ujian tiba bukan hanya siswa yang pusing akan tetapi guru jauh lebih pusing. Rasa khawatir menghinggapi setiap sudut hati para guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bahkan sampai ke pimpinan tinggi provinsi yaitu gubernur.

Guru khawatir disalahkan kepala sekolah jika hasil UASBN dan UN anak-anak rendah karena takut dianggap tidak profesional dalam mengajar. Kepala sekolah khawatir diberhentikan atau dimutasi karena dianggap tidak bisa memimpin sekolah. Kepala dinas khawatir ditegur gubernur karena dianggap kurang memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru-guru, dan gubernur khawatir daerahnya disoroti media massa karena nilai kelulusan siswa di daerah yang dipimpinnya rendah dibandingkan daerah yang lain. Karena kekhawatiran itulah bagian terendah dari kasta pendidikan yang berkecimpung langsung dengan siswa yaitu guru dipaksa untuk membuat nilai siswa-siswinya memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Kebijakan adanya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada setiap mata pelajaran menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah membuat sekolah-sekolah terpacu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Semakin tinggi KKM dianggap sebagai sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendangan seperti itu sebenarnya tidak salah, akan tetapi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, guru-guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya menjadi momok yang bertentangan dengan hati nurani yaitu manipulasi nilai siswa. Kegiatan dongkrak nilai bahkan menjadi budaya di setiap akhir siswanya mengerjakan

ujian. Bahkan ada yang membocorkan jawaban dan yang lebih parah diminta untuk menghapus jawaban UN dan menggantinya dengan jawaban yang benar.

Bagi sebagian besar sekolah di daerah-daerah yang sudah memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pendidik yang mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh nilai KKM 70-80 tidak jadi masalah. Akan tetapi bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) atau daerah terpencil mampukah? Guru dihadapkan dengan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah seperti gedung yang jumlahnya terbatas, laboratorium yang tidak ada, buku yang menjadi sumber belajar siswa terbatas, listrik belum masuk, apalagi jaringan internet yang menyediakan dan memudahkan siswa untuk mengakses segala informasi pun tidak tersedia. Ditambah dengan kondisi masyarakat yang kurang peduli dengan pendidikan menjadikan KKM bagai buah simalakama. Jika dibuat KKM rendah takut dianggap tidak kompeten, sebaliknya jika KKM yang dibuat tinggi menjadikan budaya dongkrak nilai sebagai hal yang wajar, biasa, dan diharuskan.

Saat guru mengganti, merubah, menambah nilai siswa secara tidak langsung telah menipu siswa kita sendiri. Misalnya: nilai siswa A pada pelajaran Biologi memiliki rata-rata dibawah 50 dijadikan standar KKM (misal 70), siswa yang dapat 60 juga harus dapat 70 dan seterusnya. Lalu apa bedanya siswa yang dapat nilai 70 murni dengan siswa yang dapat nilai 70 dengan hasil dongkrak? Jika hanya dilihat di atas kertas keduanya sama akan tetapi dari segi kemampuan siswa (*soft skill*) tidak sama. Jika pun nanti lulus kemudian masuk dunia kerja atau yang melanjutkan sekolah hasilnya jauh berbeda. Sehingga jangan kaget jika ada siswa kelas VI SD masih ada yang belum bisa calistung (membaca, menulis, dan menghitung), siswa SMP bisa menulis dengan cara menyalin saja tanpa mengerti apa yang dia tulis. Bahkan yang lebih parah lagi siswa yang sudah berada di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) tidak bisa menulis dengan baik, membaca terbata-bata, tidak tahu menjumlahkan atau perkalian. Kalau sudah begitu pasti akan ada saling lempar kesalahan. Guru SMA menyalahkan guru SMP, guru SMP menyalahkan guru SD, guru SD menyalahkan orang tua siswa yang tidak pernah mengajari anaknya membaca, menulis, atau menghitung.

Adanya KKM membuat sebagian guru menggampangkan nilai, mereka malas datang ke sekolah (apalagi guru yang ditempatkan di daerah yang sulit dijangkau

dengan transportasi darat atau laut), malas mengajar, tidak mau melakukan perbaikan pembelajaran (*remidial teaching*) atau pengayaan. Berbagai alasan pun ditelontarkan oleh guru sebagai pembelaan. Bahkan jika guru rajin datang ke sekolah, rajin mengajar, rajin memberikan *remidial teaching* dan menginginkan yang terbaik buat siswanya dengan transparan nilai tidak luput dari budaya dongkrak nilai. Padahal dengan memberitahukan nilai yang sebenarnya dapat dijadikan alat untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Disinilah sistem berlaku, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi memiliki hak memutuskan bahwa nilai dibuat standar KKM dengan alasan demi masa depan siswa. Masa depan siswa yang dimaksud biasanya agar bisa lolos beasiswa di perguruan tinggi, masuk diperguruan tinggi favorit tanpa tes, bisa daftar sekolah akademi (Akpolda atau TNI) dengan harapan kelak di perguruan tinggi siswa tersebut bisa lebih baik, dan sebagainya. Jika harapan-harapan tersebut disampaikan oleh kepala sekolah atau guru di jenjang pendidikan menengah begitu juga dengan kepala sekolah atau guru di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

Pertanyaannya sekarang, sudah benarkah apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti itu? bukankah sebagai pendidik kita harus menanamkan kejujuran kepada siswa? Namun jika hasil belajar yang diterima oleh siswa baik dalam bentuk rapor, SKHUN, atau ijazah merupakan hasil dari manipulasi masih bisakah kita menanamkan kejujuran?

Pendidikan karakter oleh pemerintah mulai dihadirkan pada kurikulum KTSP dan puncaknya pada kurikulum 2013 yang wajib dilakukan oleh guru melalui Kompetensi Inti yang kedua (KI-2) "*Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia*". Mampukah itu dipertahankan jika pihak pembelajar tidak menjalankannya kejujuran?

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan sebenarnya sudah memaparkan dengan jelas dalam pasal 11c: "*Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;*

*pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan".* Pemerintah tidak akan menghukum suatu lembaga atau satuan pendidikan jika nilai UN tidak memenuhi KKM, kenapa satuan pendidikan harus takut? Justru jika nilai UN rendah pemerintah akan memberikan bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi pengawas pendidikan sebaiknya harus sering melakukan sosialisasi tentang hal tersebut agar tidak ada persaingan KKM antar sekolah, bahwa KKM harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di tingkat satuan pendidikan. Tujuan pemerintah pusat yang baik jangan sampai menjadi perusak karakter pendidik dengan melakukan manipulasi nilai siswa. Jika seorang guru ingin menjadikan siswanya jujur, maka guru tersebut harus jujur terlebih dahulu. Karena guru itu "digugu dan ditiru", dimana setiap tingkah lakunya dilihat dan diikuti oleh siswa.

Dalam upaya mengatasi kecurangan yang terjadi di satuan pendidikan, beberapa tahun belakangan ini pemerintah melaksanakan ujian secara *online* atau lebih dikenal dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sekolah-sekolah yang memiliki jaringan internet diwajibkan melaksanakan UNBK. Masalahnya bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah yang belum memiliki jaringan internet, dan sekolah yang belum mampu memfasilitasi UNBK?. Ini menjadi tugas pemerintah, jika pemerintah bisa membuat seluruh sekolah yang ada di Indonesia melakukan UNBK, mungkin kecurangan-kecurangan saat ujian akan berkurang, bahkan mungkin budaya dongkrak nilai akan memudar dengan sendirinya. Siswa akan termotifasi untuk belajar keras jika ingin lulus KKM, tidak mengharapkan belas kasih dari gurunya.

Dengan budaya dongkrak nilai bisakah kita mengubah nasib siswa yang memang sudah menjadi takdir atau jalan hidupnya?. Guru hanya bisa mendampingi dan memfasilitasi siswa menuju masa depannya. Jangan rusak masa depan siswa kita dengan melakukan penipuan nilai karena sejatinya siswa paham akan kemampuannya. Jika memang guru menilai dengan penilaian sesuai aturan dari pemerintah, maka tidak akan ada siswa yang protes saat dia tidak mendapatkan beasiswa kuliah karena nilainya dibawah KKM dari sekolah yang lain, tidak akan menyalahkan gurunya jika tidak diterima di sekolah favoritnya dan sebagainya. Kita sebagai guru harus selalu

menjadi panutan bagi siswa sekarang atau siswa selanjutnya. Jadilah guru yang melahirkan generasi-generasi emas Indonesia, mewujudkan cita-cita para pahlawan bangsa. Di tangan gurulah masa depan bangsa. Bagi para pendidik dimanapun berada semangat mengabdikan dan menanamkan kejujuran!